

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan No.436/Pid.B/2025/Pn.Tjk)

Oleh

Muhammad Fadhil Akbar

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk dengan terdakwa Zikri M. Harun bin Yumal Ashri, yang memperlihatkan dinamika penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yang dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan terkait terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Perkara ini juga menyoroti penerapan keadilan restoratif, di mana meskipun telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa yang disertai dengan penggantian kerugian, proses peradilan pidana tetap dilanjutkan hingga penjatuhannya pidana penjara, sehingga menimbulkan problematika hukum terkait kedudukan perdamaian dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan keadilan restoratif, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa secara yuridis telah terpenuhi karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, dalam pertimbangan hukum hakim, adanya perdamaian antara korban dan terdakwa yang disertai dengan penggantian kerugian hanya dijadikan sebagai keadaan yang meringankan dan belum dijadikan dasar utama dalam penerapan keadilan restoratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan sebagaimana tercermin dalam putusan ini masih bersifat terbatas, sehingga tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum belum sepenuhnya terakomodasi secara proporsional.

Muhammad Fadhil Akbar

Saran dalam penelitian adalah agar pembentuk undang-undang mengembangkan pengaturan pertanggungjawaban pidana secara lebih eksplisit, khususnya dalam penafsiran unsur *mens rea* dan *actus reus*, guna memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum serta menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penjatuhan pidana. Selain itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi keadilan restoratif yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak hanya menjadikannya sebagai pertimbangan yang meringankan, tetapi juga sebagai dasar hukum untuk menghentikan dan mengakhiri perkara pidana pada tahap persidangan, agar penerapannya lebih optimal dan selaras dengan prinsip humanis dalam KUHP Nasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, Pertimbangan Hakim, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT
**ANALYSIS OF SENTENCING IMPOSED ON PERPETRATORS OF THE
CRIMINAL OFFENSE OF MOTORCYCLE THEFT UNDER
AGGRAVATING CIRCUMSTANCES**
(Study Of Decision No. 436/Pid.B/2025/Pn.Tjk)

By

Muhammad Fadhil Akbar

Aggravated theft constitutes one of the criminal offenses that frequently occur and directly affect the public sense of security. One case that is particularly worthy of analysis is Decision of the Tanjung Karang District Court Number 436/Pid.B/2025/PN.Tjk involving the defendant Zikri M. Harun bin Yumal Ashri, which illustrates the dynamics of criminal law enforcement, particularly in the context of criminal liability for perpetrators of aggravated motorcycle theft and the basis of judicial considerations in adjudicating such cases, which in practice still give rise to issues concerning the fulfillment of the principles of legal certainty, justice, and utility. This case also highlights the application of restorative justice, wherein despite the existence of a settlement between the victim and the defendant accompanied by compensation for losses, the criminal justice process was nevertheless continued until the imposition of a custodial sentence, thereby giving rise to legal issues regarding the legal standing of settlement within criminal proceedings.

This research employs a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research is conducted through library research on laws and regulations as well as criminal law doctrines related to criminal liability and restorative justice, complemented by a juridical analysis of the judges' legal reasoning (ratio decidendi) in Decision Number 436/Pid.B/2025/PN.Tjk.

The results of the research indicate that the defendant's criminal liability has been juridically fulfilled, as all elements of Article 363 paragraph (1) point 3 of the Indonesian Criminal Code have been proven legally and convincingly. However, in the judges' legal considerations, the settlement between the victim and the defendant accompanied by compensation for losses was merely regarded as a mitigating circumstance and was not used as a primary basis for the application of restorative justice. This demonstrates that the implementation of restorative justice in cases of aggravated motorcycle theft, as reflected in this decision, remains limited, resulting in the objectives of sentencing oriented toward justice, utility, and legal certainty not being fully accommodated in a proportional manner.

Muhammad Fadhil Akbar

The research recommends that legislators further develop criminal liability regulations in a more explicit manner, particularly with regard to the interpretation of the elements of mens rea and actus reus, in order to provide clear guidance for law enforcement authorities and to ensure legal certainty as well as substantive justice in sentencing. In addition, it is necessary to strengthen the regulatory framework of restorative justice by granting judges the authority not only to consider it as a mitigating factor, but also to use it as a legal basis to terminate and conclude criminal cases at the trial stage, so as to optimize its implementation and ensure its alignment with the humanistic principles embodied in the National Criminal Code.

Keywords: Criminal Liability, Theft under Aggravating Circumstances, Judges Legal Considerations, Restorative Justice.